

**STRATEGI PENGKOORDINASIAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

EVA YULIANDA

1403100059

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Ilmu Administrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EVA YULIANDA
NPM : 1403100059
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : STRATEGI PENGKOORDINASIAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong Plagiat.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Maret 2018

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,

EVA YULIANDA

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : EVA YULIANDA
NPM : 1403100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : Pukul 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R.KUSNADI, M.AP (.....)
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH (.....)
PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH, MM (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

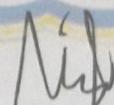
Nama : EVA YULIANDA
NPM : 1403100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : STRATEGI PENGKOORDINASIAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Medan, 09 Maret 2018

PEMBIMBING I


IDA MARTINELLY, SH, MM

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

Plt. DEKAN




Dr. RUDIANTO, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Siapa yang tidak percaya
 akan surat ini agar disebutkan
 dan tanggapnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : EVA YULIANDA
 NPM : 1403100059
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : STRATEGI PENGKOORDINASIAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LABuhan BATU UTARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/2/2018	Revisi latar belakang dan sistematika penulisan	<i>[Signature]</i>
2.	23/2/2018	Revisi sistematika penulisan, tanda baca, penggunaan huruf kapital	<i>[Signature]</i>
3.	26/2/2018	Revisi bab I dan bab II	<i>[Signature]</i>
4.	27/2/2018	Revisi bab II tentang cara pengutipan buku	<i>[Signature]</i>
5.	1/2/2018	Revisi bab III	<i>[Signature]</i>
6.	2/2/2018	Revisi bab III dan bab IV	<i>[Signature]</i>
7.	6/3/2018	Revisi bab IV dan bab V	<i>[Signature]</i>
8.	8/3/2018	Revisi bab V dan daftar pustaka	<i>[Signature]</i>

Medan, 24...Maret.....2018..

Dekan,
[Signature]
 Dr. Purnanto, M.Si

Ketua Program Studi,
[Signature]
 (NAILI KHAIRIAH S.P., M.Pd)

Pembimbing ke : 1.
[Signature]
 (IDA MARTINELY S.H., M.M)

ABSTRAK

STRATEGI PENGKOORDINASIAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

EVA YULIANDA

1403100059

Strategi adalah sekumpulan pilihan kritis/cara yang digunakan untuk perencanaan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran. Pengkoordinasian adalah usaha kerja sama antara unit-unit yang terpisah yang dilakukan secara teratur yang di tanggungjawab oleh pemimpin. Program Kampung Keluarga Berencana adalah Program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan peran serta pemerintah dan seluruh stakeholder dalam memfasilitasi jalannya program. Kebijakan ini berpijak pada Surat Edaran Menteri Dalam Negari No.440/70/SJ/ Tanggal 11 Januari 2016 Tentang Hal Perencanaan Dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengkoordinasian dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan strategi pengkoordinasian dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara belum sepenuhnya optimal, karena masih ada tumpang tindih pekerjaan hal ini karena pengkoordinasian yang masih belum terspesialisasi dengan baik. Namun untuk hal pencapaian tujuan sudah tercapai, karena sudah semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat hal ini karena strategi pencapaian program yang sudah berjalan dengan baik oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana sudah berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberikan hanya saja pihak penyalur kurang berpartisipasi dalam penyaluran alat kontrasepsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “ Strategi Pengkoordinasian Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara “ .

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat ini, semoga dengan memperbanyak syafaatnya kelak kita mendapat pertolongan di yaumul akhir kelak, Amin Ya Allah Ya Rabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam segi kemampuan dan penggunaan bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik lagi dan berguna bagi orang lain.

Dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati serta kesadaran diri penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dan tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda tercinta **MUKSIN PASARIBU** dan mamak tersayang **NURYANTI BR SAGALA** dimana selalu mendukung, memperhatikan, dan selalu memberi motivasi penuh sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Beriring do'a dan restu orang tua penulis yang menyayangi dan telah membesarkan dan mendidik penulis tanpa kenal lelah serta selalu mendo'akan yang terbaik. Memberikan pelajaran moral dan material kepada penulis sampai sekarang ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. RUDIANTO,M.Si** selaku Pelaksana Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu **Nalil Khairiah,S.IP,M.PD** selaku Ketua Program Study Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ananda Mahardika, S.SOS,M.SP** selaku Sekretaris Program Study Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. **Ibu Ida Martinelly SH,MM** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah Memberikan Bimbingan dan Masukan dalam Menyelesaikan Skripsi.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen yang telah Memberikan Bimbingan dan Memberikan Ilmu Kepada Penulis Selama Menjalani Perkuliahan.
7. Teristimewa buat adik-adik kandung saya tercinta yang sudah memberi semangat, perhatian dan motivasi dalam segala hal. **Ervin Maysurya Pasaribu, Aulia Rahma Dhani Pasaribu, Putri Domianda Pasaribu, Gadis Ayatul Husna Pasaribu, Adiba Agustina Pasaribu.**
8. Amangboru **Supardi** dan Uden **Marlina br Pasaribu** yang telah membatu support dana perkuliahan saya.
9. Teristimewa buat pacar saya **AZRI ANDI** yang selalu menemani, memperhatikan, memberi semangat, dan memotivasi, dalam menyusun skripsi ini.
10. Sepupu yang menjadi teman satu kamar dan juga teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Sri Utami** yang sudah memberi banyak pelajaran hidup baik sedih maupun senang.
11. Dan keluarga besar terimakasih.
12. Bapak **H.Muhammad Suib** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dengan kerendahan hatinya menerima saya dengan baik riset di kantornya.

13. Dan rekan-rekan lainnya stambuk 2014 Ilmu Administrasi Pembangunan yang selama perkuliahan selalu semangat dan berbagi ilmu, berbagi cerita dan hal lainnya.
14. Bapak-bapak Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu segala urusan administrasi selama berlangsungnya perkuliahan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

EVA YULIANDA

Npm.

1403100059

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Sistematika Penulisan	10
 BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Strategi	12
1. Pengertian Strategi	12
2. Tahapan Penyusunan Strategi	13

B. PENGKOORDINASIAN.....	16
1. Pengertian Pengkoordinasian	16
2. Bentuk Pengkoordinasian.....	19
3. Tujuan Pengkoordinasian.....	21
4. Indikator Pengkoordinasian	23
C. Strategi Pengkoordinasian Program Kampung Keluarga Berencana.....	25
D. Program Kampung Keluarga Berencana.....	27
1. Pengertian Program Kampung Keluarga Berencana.....	27
2. Tujuan Program Kampung Keluarga Berencana	31
3. Manfaat Program Kampung Keluarga Berencana	32
4. Indikator Keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Kerangka Konsep	35
C. Defenisi Konsep	36
D. Kategorisasi.....	37
E. Narasumber	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL Penelitian	46
B. Pembahasan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1.1 Percepatan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara Tiga Tahun Terakhir	3
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan Atau Pekerjaan	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	36
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Lampiran II : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran III : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK-3 Surat Permohonan Proposa Skripsi

Lampiran V : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VII : Surat Pengantar Izin Penelitian Skripsi

Lampiran VIII : Surat Izin Diterima Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara

Lampiran IX : Surat Keterangan Sudah Selesai Penelitian oleh Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas tinggi merupakan salah satu modal atau aset dalam pembangunan sebuah daerah. Penduduk sebagai suatu aset apabila penduduk memberikan kontribusi dari segi fisik maupun mental dalam pembangunan, sebaliknya jumlah penduduk yang besar dan berkualitas rendah akan menjadi beban suatu daerah karena menghambat laju pertumbuhan dan menimbulkan berbagai masalah sosial.

Menurut Presiden Joko Widodo Program KB tidak lagi bergema dan hampir tidak terdengar lagi seperti pada era Orde Baru, banyak faktor yang menghambat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjalankan program KB diantaranya sosialisasi yang kurang baik kepada masyarakat dan kurangnya fasilitas yang mendukung program KB tersebut selain itu juga pola pikir yang tertanam dalam masyarakat yaitu "*banyak anak banyak rezeki*" juga menjadi penghambat. ([Http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/29/nvfej3335-bkkbn-bakal-bangun-kampung-kb](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/29/nvfej3335-bkkbn-bakal-bangun-kampung-kb))

Pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan kependudukan melalui Program Keluarga Berencana yang kemudian diselaraskan dengan program Kampung Keluarga Berencana dimulai dengan menunjuk Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang mendapat mandat dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana. Melalui program Kampung Keluarga Berencana pemerintah mengharapkan terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera yaitu keluarga dengan dua anak sebagai tujuannya.

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Pembangunan Keluarga Berencana. Dalam rangka Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2015-2019, diharapkan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional untuk dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/ sasaran. Untuk secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, dalam hal ini membentuk Kampung Keluarga Berencana.

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terus meningkat merupakan salah satu faktor yang juga melatar belakangi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana karena jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun-ketahun cukup tinggi seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1**PERCEPATAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan			
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumahtangga	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
[1]	[2]	[3]	[4]
010 NA IX-X	55470	11807	4.70
020 Marbau	38985	9707	4.02
030 Aek Kuo	30486	7255	4.20
040 Aek Natas	36897	8188	4.51
050 Kualuh Selatan	58508	13497	4.33
060 Kualuh Hilir	32346	7877	4.11
070 Kualuh Hulu	69112	15884	4.35
080 Kualuh Leidong	29293	7080	4.14
2015	351 097	47 014	4.46
2014	347 465		
2013	337 404		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2018

Mendengar istilah “ kampung “, kesan yang muncul di pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau beberapa keluarga. Namun dalam hal ini Kampung Keluarga Berencana merupakan suatu tempat atau hunian sekumpulan orang atau keluarga yang berada di suatu daerah yang termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai perkampungan yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat atau keluarga yang ada di dalam kampung tersebut agar menjadi keluarga yang lebih baik dan memiliki taraf tingkat kehidupan yang lebih layak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terkait dengan pengkoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembinaan Program Kampung Keluarga Berencana ditingkat kecamatan diikuti pemangku kepentingan tingkat kecamatan dan desa/lokasi Kampung Keluarga Berencana untuk kemudian ditindaklanjuti dengan sanggar mini tingkat desa dan pelatihan kader desa/kelurahan (kelompok kerja kader pra-bidang yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi kampung Keluarga Berencana).

Oleh karena itu, untuk mendukung operasionalisasi dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di perlukan dukungan kegiatan yang bersifat lintas sektor dalam bentuk koordinasi., dalam hal ini diperlukan strategi yang

merupakan hal yang penting bagi instansi dimana strategi adalah serangkaian cara yang dilakukan dalam kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu pengkoordinasian program harus lebih proaktif dalam mencermati paradigma baru global agar pengkoordinasian dapat berjalan dengan efektif.

Dalam hal ini setiap kader diharapkan mampu melaksanakan strategi kegiatan Kampung Keluarga Berencana yang telah direncanakan berupa komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui:

- a. Komunikasi Informasi Edukasi individu atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran lokasi Kampung Keluarga Berencana.
- b. Komunikasi Informasi Edukasi kelompok dengan memanfaatkan forum-forum sosial seperti pengajian, pertemuan Bina Keluarga Balita (BKB) , pertemuan Bina Keluarga Remaja (BKR), pertemuan Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPKS), arisan dan taman Posyandu.
- c. Komunikasi Informasi Edukasi massa dengan memanfaatkan media tradisional, mupen, dan acara-acara hiburan rakyat.
- d. Komunikasi Informasi Edukasi konseling kepada sasaran yaitu, ibu hamil, promosi kesehatan ibu menyusui (BUTEKI) , penduduk usia subur bukan peserta KB, calon peserta KB untuk menentukan dan menetapkan pilihan kontrasepsi yang digunakan.

Keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan workshop yang tingkat Kabupaten/Kota oleh perwakilan BKKBN Provinsi, yang bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman tentang konsep Kampung KB termasuk indikator-indikator keberhasilan yang harus dicapai.
2. Mensosialisasikan Rencana Program dan Kegiatan Kampung KB yang telah disusun.
3. Mensosialisasikan format-format evaluasi dan pelaporan
4. koordinasi lintas sector dan kemitraan.

Kemudian terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan kegiatan Kampung KB, dukungan mitra kerja/stakeholders serta program dan kegiatan lintas sektor juga harus dapat diintegrasikan di Kampung Keluarga Berencana yang dapat bersinergi, berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain dengan sektor-sektor pembangunan program Kampung Keluarga Berencana sehingga memiliki produktivitas yang efektif dan efisien.

Dalam hal ini pengkoordinasian instansi yang wajib dalam mendukung pembentukan dan pembinaan Kampung Keluarga Berencana antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pemenuhan akta kelahiran dan KTP, Dinas Kesehatan terkait pemenuhan alat-alat kontrasepsi serta selaku unit yang membina

keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan posyandu, PLKB di kecamatan serta camat.

Namun kenyataan yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, belum terlihat adanya sanggar-sanggar khusus yang dibangun untuk tempat masyarakat bersosialisasi dengan instansi dan stakeholder terkait program kampung keluarga berencana, dalam hal ini masih menggunakan fasilitas desa seperti aula kantor kepala desa. Kegiatan yang ingin diterapkan sesuai tujuan program juga belum sepenuhnya tersosialisasi, seperti dalam kegiatan sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Kampung Keluarga Berencana yang belum diikuti oleh seluruh masyarakat Kampung Keluarga Berencana.

Demikian halnya dengan pelaksanaan pengkoordinasian juga belum optimal karena dalam pelaksanaan penyuluhan masih ada tumpang tindih pekerjaan antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Kesehatan yakni bidan Puskesmas.

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti masalah strategi yang dikaitkan dengan pengkoordinasian program, dan mengambil judul studi tentang “ **Strategi Pengkoordinasian Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara**”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah: **“Bagaimana Strategi Pengkoordinasian Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara?”**.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui strategi pengkoordinasian program Kampung Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai strategi pengkoordinasian program Kampung Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengkoordinasian.

c. Secara akademik

Diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu administrasi pendidikan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan objek yang diteliti antara lain: Konsep Strategi, tahapan penyusunan strategi, Pengkoordinasian, jenis pengkoordinasian, tujuan pengkoordinasian, indikator pengkoordinasian, Program kampung keluarga berencana, tujuan program, manfaat program kampung keluarga berencana serta strategi pengkoordinasian dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu penelitian dan lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang analisis hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan kemudian menguraikan tentang pengamatan, pembahasan atau analisis dari jawaban responden.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan hasil pengamatan dan selanjutnya dikemukakan beberapa saran-saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Amstrong dalam Triton tahun (2003:39-42) menambahkan bahwa setidaknya terdapat tiga pengertian strategi. Pertama, strategi merupakan deklarasi maksud yang mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan, yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi merupakan perspektif dimana isu kritis atau factor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi. Ketiga, strategi pada dasarnya adalah mengenai penetapan tujuan dan mengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang sehingga dapat mencapai kesesuaian strategi antara tujuan strategi dan basis sumber daya.

Gaffar dalam Syaiful Sagala (2010:137) strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integrative yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi. Strategi merupakan instrument manajemen yang ampuh dan tidak dapt dihindari tidak hanya untuk survival dan memenangkan persaingan tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang.

Menurut Siagian (2004) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Lynch dalam Wibisono (2006:50-51) strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling terikat. Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan.

Berdasarkan keseluruhan definisi di atas, maka strategi dapat didefinisikan sebagai suatu sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penetapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, yang memperhatikan keunggulan kompetitif, komprehensif, dan sinergis yang ideal dan berkelanjutan, sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan ideal dari individu atau organisasi.

2. Tahapan Penyusunan Strategi

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. maka sedikitnya ada enam tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

a. Seleksi mendasar dan kritis terhadap permasalahan, dilakukan berdasarkan faktor internal maupun eksternal yang menjadi penyebab permasalahan individu atau organisasi. Langkah-langkah seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan

adalah: (1). mengidentifikasi dan menginventarisasikan seluruh permasalahan. (2). mengidentifikasi dan mengelompokan masing-masing permasalahan berdasarkan faktor internal dan eksternalnya. (3)mengurutkan permasalahan berdasarkan tingkat kepentingannya. (4). menentukan skala prioritas penyelesaian masalah berdasarkan kuadran prioritas menurut kepentingan-kepentingan dan urgensi yang telah diurutkan.

b. Tujuan dasar dan sasaran strategi, suatu tujuan dan sasaran dikatakan strategis apabila seoptimal mungkin mampu mempertegas arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang secara keseluruhan dari suatu organisasi atau individu. Oleh karena itu, tujuan dasar dan sasaran strategi harus benar-benar dirumuskan melalui identifikasi yang jeli. Tujuan dasar dan sasaran strategi yang dirumuskan jangan sampai bertentangan dengan arah, cakupan dan perspektif jangka panjang secara keseluruhan dari suatu organisasi atau individu. Tujuan dan sasaran strategi merupakan unsur yang sangat vital karena pencapaian tujuan dasar dan sasaran strategi ini merupakan acuan yang menjadi dasar pengukuran berhasil atau tidaknya suatu strategi. Apabila salah menentukan tujuan dasar dan strategi, maka akan salah pula pemilihan alat ukur keberhasilan pencapaian suatu strategi.

c. Perencanaan Tindakan, dalam konteks penyusunan strategi, ada dua tipe rencana yang harus diperhatikan. Pertama, rencana konsepsional atau teoritis, sebagai rencana yang ideal dan diharapkan dapat terwujud. Kedua, rencana tindakan yang lebih mendasar kepada faktor-faktor lapangan dengan segala perkiraan distorsi yang mungkin terjadi. Setidaknya ada tiga langkah yang harus diperhatikan dalam

menyusun rencana tindakan, yaitu: (1) meninjau kembali langkah-langkah dalam rencana strategi yang mungkin diharapkan. (2) mengidentifikasi dan menginventarisasikan faktor-faktor operasional baik internal dan eksternal di lapangan yang mendukung dan menghambat tingkat keberhasilan rencana konseptual. (3) berdasarkan perhitungan dan pertimbangan atas faktor-faktor operasional di lapangan yang telah teridentifikasi dan terinventarisasi.

d. Rencana penyumberdayaan, dalam konteks alokasi sumberdaya manusia untuk keberhasilan rencana tindakan. Amstrong (2003: 280-281) menyatakan bahwa strategi itu harus dimodifikasi dalam rencana tindakan yang dilandasi pada hasil aktivitas perencanaan yang saling terkait.

e. Pertimbangan keunggulan, perencanaan strategi pada akhirnya mempertimbangkan keunggulan. Namun jauh sebelum disusun perencanaan memang sudah harus diidentifikasi keunggulan-keunggulan yang ada pada suatu entitas. Supriyanto (2005) menyatakan bahwa perumusan strategi disusun terlebih dahulu sebelum disusunnya perencanaan strategi. Pendapat ini semakin menguatkan pentingnya identifikasi keunggulan sedini mungkin.

f. Pertimbangan Keberlanjutan, keberlanjutan suatu strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan akan memungkinkan sebuah perusahaan menjadi semakin peka terhadap setiap perubahan yang terjadi. Pertimbangan keberlanjutan dalam penyusunan strategi dapat disebut sebagai langkah penilaian terakhir atas keandalan

dan kemandirian strategi. Strategi yang handal tentunya strategi yang mampu melewati berbagai keadaan dan tantangan dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam penyusunan strategi yakni harus ada seleksi mendasar terhadap permasalahan untuk selanjutnya dilakukan penetapan tujuan dan sasaran strategi yang optimal, kemudian merencanakan tindakan baik secara konseptual maupun teoritis, merencanakan sumber daya, mempertimbangkan keunggulan dan yang terakhir mempertimbangkan keberlanjutan strategi dengan kata lain melakukan evaluasi hal tersebut berguna untuk mempertimbangkan apakah strategi tersebut masih dapat digunakan atau justru harus mencari strategi yang baru.

B. Pengkoordinasian

1. Pengertian Pengkoordinasian

Pengkoordinasian adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana (2011:33) : “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”.

Pendekatan untuk pencapaian pengkoordinasian yang efektif yaitu komunikasi, karena komunikasi adalah kunci pengkoordinasian yang efektif. Pengkoordinasian secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidak pastian tugas yang dikoordinasiakan semakin membutuhkan informasi.

Ada tiga pendekatan untuk pencapaian pengkoordinasian yang efektif, yaitu (1) hanya menggunakan teknik-teknik manajemen dasar: hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Organisasi yang relative sederhana tidak memerlukan peralatan pengkoordinasian lebih dari teknik-teknik tersebut. (2) pendekatan kedua menjadi

diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi lebih saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. (3) disamping peningkatan pengkoordinasian potensial, mengurangi kebutuhan akan pengkoordinasian dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan.

Handayani (2006) mengatakan yang menjadi ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut, pertama adalah tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pemimpin. Yang kedua koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Lalu koordinasi adalah proses kerja yang terus-menerus, artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

Selanjutnya, adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok bukan terhadap individu tetapi yang bekerjasama di dalam kelompok untuk tujuan bersama dan didukung oleh adanya konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari setiap tindakan individu yang bekerjasama sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama dan memiliki tujuan organisasi, yaitu tujuan bersama. Kesatuan usaha/tindakan individu kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Dari ciri-ciri diatas, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan pengertian pengkoordinasian adalah suatu usaha kerjasama antara unit-unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi yang dilakukan secara terus-menerus dan teratur dengan menggunakan pendekatan teknik-teknik hirarki manajerial yang di dukung adanya kesatuan usaha atau tindakan yang ditanggungjawab oleh pemimpin.

2. Bentuk Pengkoordinasian

Bentuk pengkoordinasi Menurut Inu Kencana (2011:35), Bentuk pengkoordinasian adalah :

- a. Pengkoordinasian Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- b. Pengkoordinasian Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

- c. Pengkoordinasian Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Sedangkan menurut Hasibuan (2009:86-87) bentuk pengkoordinasian dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Koordinasi Vertikal yaitu kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Koordinasi horizontal yaitu pengkoordinasian tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi yang setingkat.s

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pengkoordinasian adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat, lebih tinggi ke lembaga lain dan antara lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan.

3. Tujuan Pengkoordinasian

Menurut Hasibuan (2008:87) tujuan pengkoordinasian, antara lain sebagai berikut: (a) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi. (b) Untuk menjerumuskan keterampilan spesialis ke arah sasaran organisasi. (c) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. (d) Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. (e) Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M kearah sasaran organisasi. (f) Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran organisasi.

Tata cara yang digunakan oleh pemimpin staf untuk menetapkan langkah-langkah tersebut, yaitu untuk terkoordinasi, pada umumnya adalah sebagai berikut:

- (1). Melakukan briefing untuk memberitahukan kebijaksanaan pemimpin organisasi kepada staf, yang dalam waktu sesingkat mungkin harus diketahui dan dapat dirumuskan.
- (2). Rapat koordinasi untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemimpin serta mengadakan integrasi dari pada pokok-pokok hasil pekerjaan.
- (3). Mengumpulkan laporan-laporan mengenai pelaksanaan keputusan pemimpin organisasi.
- (4). Mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan pemimpin organisasi serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin organisasi.
- (5). Peliharaan hubungan dalam berbagai bentuk demi meningkatnya keserasian kerja.

Pengkoordinasian merupakan salah satu alat utama bagi organisasi untuk mempercepat proses pencapaian tujuan. Pengkoordinasian diperlukan pada semua tingkat kegiatan organisasi, baik pada tingkat perumusan kebijaksanaan maupun pada tingkat pelaksanaan sejak awal dimasukkan kedalam rencana atau program yang disusun.

Pengkoordinasian sangat diperlukan dalam manajemen, terutama untuk menyatukan kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan organisasi. Pengkoordinasian diperlukan untuk menghubungkan bagian satu dengan bagian yang lain sehingga tercipta suatu kegiatan yang terpadu mengarah pada tujuan umum. Tanpa pengkoordinasian, spesialisasi dan kelembagaan kerja yang dilakukan pada setiap usaha kerjasama akan sia-sia karena setiap bagian cenderung hanya memikirkan pekerjaan atau tugas masing-masing dan melupakan tujuan lembaga secara keseluruhan.

Melalui pengkoordinasian setiap bagian yang menjalankan fungsi dengan spesialisasi tertentu dapat disatupadankan dan dihubungkan satu sama lain sehingga dapat menjalankan peranannya secara selaras dalam mewujudkan tujuan bersama. Pengkoordinasian sangat penting meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan lembaga. Dengan demikian, manfaat koordinasi dapat didefinisikan sebagai berikut: (a) Menghilangkan dan menghindari perasaan terpisah satu sama lain antar atasan dan bawahan. (b) Menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa dirinya atau jabatannya yang paling penting (c) Mengurangi dan menghindari kemungkinan

timbulnya pertentangan antara pejabat dan pelaksana (d) Mengindari timbulnya rebutan fasilitas (e) Mengindari terjadinya peristiwa menunggu yang memakan waktu lama (f) Menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan pekerjaan suatu kegiatan. (g) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan. (h) Menumbuhkan kesadaran tugas oleh para pejabat untuk saling memberikan bantuan satu sama lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat pengkoordinasian adalah sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja /komunikasi. Pengkoordinasian diperlukan tidak hanya sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Akan tetapi juga untuk mengawasi agar tindakan tersebut benar-benar dijalankan dengan tepat.

4. Indikator Pengkoordinasian

Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur suatu pengkoordinasian. Hasibuan (2006:88-89) menjelaskan ada beberapa indikator dari pengkoordinasian tersebut, yaitu sebagai berikut: (a) Adanya kerjasama, kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi

secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu objek yang dikasi, dapat dianggap bahwa objek ini tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi, sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan.

Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras. (b) Adanya kesatuan tindakan, pada hakekatnya pengkoordinasian memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada suatu pengkoordinasian.

Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap kegiatan individu sehingga terdapat keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pada pemimpin untuk memperoleh suatu pengkoordinasian yang baik dengan

mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. (c) Adanya komunikasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari suatu koordinasi ataupun pengkoordinasian, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota kan semakin tinggi dan pemimpin memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dan komunika dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka indikator keberhasilan suatu pengkoordinasian dapat dilihat dari keselarasan kerjasama dalam melakukan usaha-usaha individu sehingga terdapat keserasian pencapaian hasil dengan adanya komunikasi antara anggota dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

C. Strategi Pengkoordinasian Program Kampung Keluarga Berencana

Strategi pengkoordinasian program Kampung Keluarga Berencana dikoordinasikan oleh perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dengan melibatkan seluruh unsur di dalam struktur organisasi Kampung Keluarga Berencana melalui forum Musyawarah yang sesuai. Ditingkat

Kecamatan, diselenggarakan lokakarya mini yang diikuti oleh pemangku kepentingan tingkat kecamatan dan desa/lokasi Kampung Keluarga Berencana untuk kemudian ditindaklanjuti dengan lokakarya mini tingkat desa dan pelatihan kader Desa/Kelurahan dengan target setiap kader mampu melaksanakan kegiatan Kampung Keluarga Berencana yang telah direncanakan. Kader melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat melalui: (a). Komunikasi, Informasi dan Edukasi atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran (b). Komunikasi, Informasi dan Edukasi individu dengan memanfaatkan forum-forum sosial (Pengajian, Pertemuan, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pertemuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, arisan Taman Posyandu.) (c).Komunikasi, Informasi dan Edukasi Massa dengan memanfaatkan media tradisional, Mupen, acara-acara hiburan rakyat (d).Komunikasi, Informasi dan Edukasi Konseling kepada sasaran untuk menentukan dan menetapkan pilihan kontrasepsi yang digunakan.

Kelompok kegiatan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana terdiri dari: (1). Forum masyarakat terdiri dari Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Toma, Toga dan Todat (2). Petugas Lini Lapangan terdiri dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, Bidan, PKK, PPL dan Petugas Lapangan Instansi Terkait (3). Kelompok kegiatan kader-kader per Bidangsesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung Keluarga Berencana. (Kader bidang kesehatan)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pengkoordinasian program kampung keluarga berencana dilakukan dengan menyelenggarakan seminar mini yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilaksanakan sesuai dengan kelompok dan pelaksana kegiatan.

D. Program Kampung Keluarga Berencana

1. Pengertian Progam Kampung Keluarga Berencana

Menurut UU RI Nomor 52 Tahun 2009 keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan serta bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan keluarga berencana diselenggarakan melalui 4 program pokok, yaitu: Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan, Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional diberikan mandat untuk melakukan program kependudukan, menyiapkan grade design kependudukan, menyiapkan target apa yang dicapai dalam suatu wilayah yang berkaitan dengan kependudukan yang instrumennya adalah rumah tangga. Dalam hal ini Badan Kependudukan Keluarga

Berencana Nasional membentuk program yaitu Program Kampung Keluarga Berencana ini juga merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri dalam negeri No. 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 Tentang Hal Perencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana.

Program Kampung Keluarga Berencana adalah suatu tempat atau hunian sekumpulan orang atau keluarga yang berada di suatu daerah yang termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai perkampungan yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat atau keluarga yang ada di dalam kampung tersebut agar menjadi keluarga yang lebih baik dan memiliki taraf tingkat kehidupan yang lebih layak. Dengan menjadikan kampung yang terpilih sebagai kampung keluarga berencana menjadi kampung yang memiliki warga masyarakat yang memperhatikan kesehatan keluarga, memperhatikan kesehatan reproduksi, memperhatikan pendidikan keluarga serta memberikan bekal keterampilan kepada masyarakatnya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup serta kualitas ekonomi keluarga masyarakat dalam hal ini kampung keluarga berencana ditandai dengan tugu/gapura yang bertuliskan ” Kampung Keluarga Berencana”.

Program ini adalah salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kualitas kependudukan di Indonesia, yang basisnya setingkat dusun yang mempunyai latar belakang peserta keluarga berencana yang rendah, daerah pinggiran, daerah miskin dan terpencil serta mengatur sumber daya manusia, menyeimbangkan daya

tampung lingkungan dengan sumber daya yang ada serta pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Kampung Keluarga Berencana dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program keluarga berencana sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam Perundang-undangan disebutkan fungsi keluarga meliputi: (1) fungsi cinta kasih. (2) fungsi sosial budaya. (3) fungsi perlindungan. (4) fungsi reproduksi. (5) fungsi sosialisasi dan pendidikan. (6) fungsi ekonomi, dan (7) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung Keluarga Berencana juga wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan ke 3,5 dan 8. Agenda prioritas pembangunan yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda prioritas pembangunan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta nawacita kedelapan yaitu melakukan

revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proposional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kriteria wilayah yang dapat dijadikan sebagai Kampung Keluarga Berencana harus memiliki unsur seperti unsur berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di daerah aliran sungai (DAS), di daerah bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung Keluarga Berencana wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai.

Dengan demikian Program Kampung Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kualitas kependudukan di Indonesia, yang basisnya setingkat dusun yang mempunyai latar belakang pesertaan keluarga berencana yang rendah, daerah pinggiran, daerah miskin dan terpencil serta mengatur sumber daya manusia, menyeimbangkan daya tampung lingkungan dengan sumber daya yang ada serta pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

2. Tujuan Program Kampung Keluarga Berencana

Kampung keluarga berencana memiliki tujuan utama yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung ataupun yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berkualitas.
- b. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga.
- c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemangunan berwawasan kependudukan.
- d. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi.
- e. Untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui program bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia.

Berdasarkan uraian diatas tujuan program kampung keluarga berencana adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dalam hal mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan peran serta pemerintah dan

seluruh stakeholder dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program kampung keluarga berencana.

3. Manfaat Program Kampung Keluarga Berencana

Manfaat Kampung Keluarga Berencana selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung Keluarga Berencana tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.

Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan Keluarga Berencana, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan KTP, penyediaan buku-buku bacaan, Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas maka, manfaat program kampung keluarga berencana adalah untuk membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana

Sebagai sebuah proses, indikator ketercapaian model Kampung Keluarga Berencana tidak semata-mata hanya melihat hasil, namun keberhasilan juga didasarkan pada input, proses dan output. Keberhasilan input ditandai dengan jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh Keluarga Berencana yang proporsional, ketersediaan dukungan anggaran untuk program dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional yang cukup. Sedangkan keberhasilan proses ditandai dengan: peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, peningkatan kalitas pelayanan KB, pertemuan berkala kelompok kegiatan yang telah dibentuk, serta pelayanan Taman Posyandu, Surat Nikah, Akta Kelahiran dan KTP.

Sedangkan keberhasilan output ditentukan berdasarkan: setiap RT/RW memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari pendataan keluarga hingga capainya 100%, peserta KB aktif diatas rata-rata, peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan keluarga, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian diatas indikator keberhasilan program kampung keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa aspek yakni, aspek peningkatan pengendalian penduduk, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

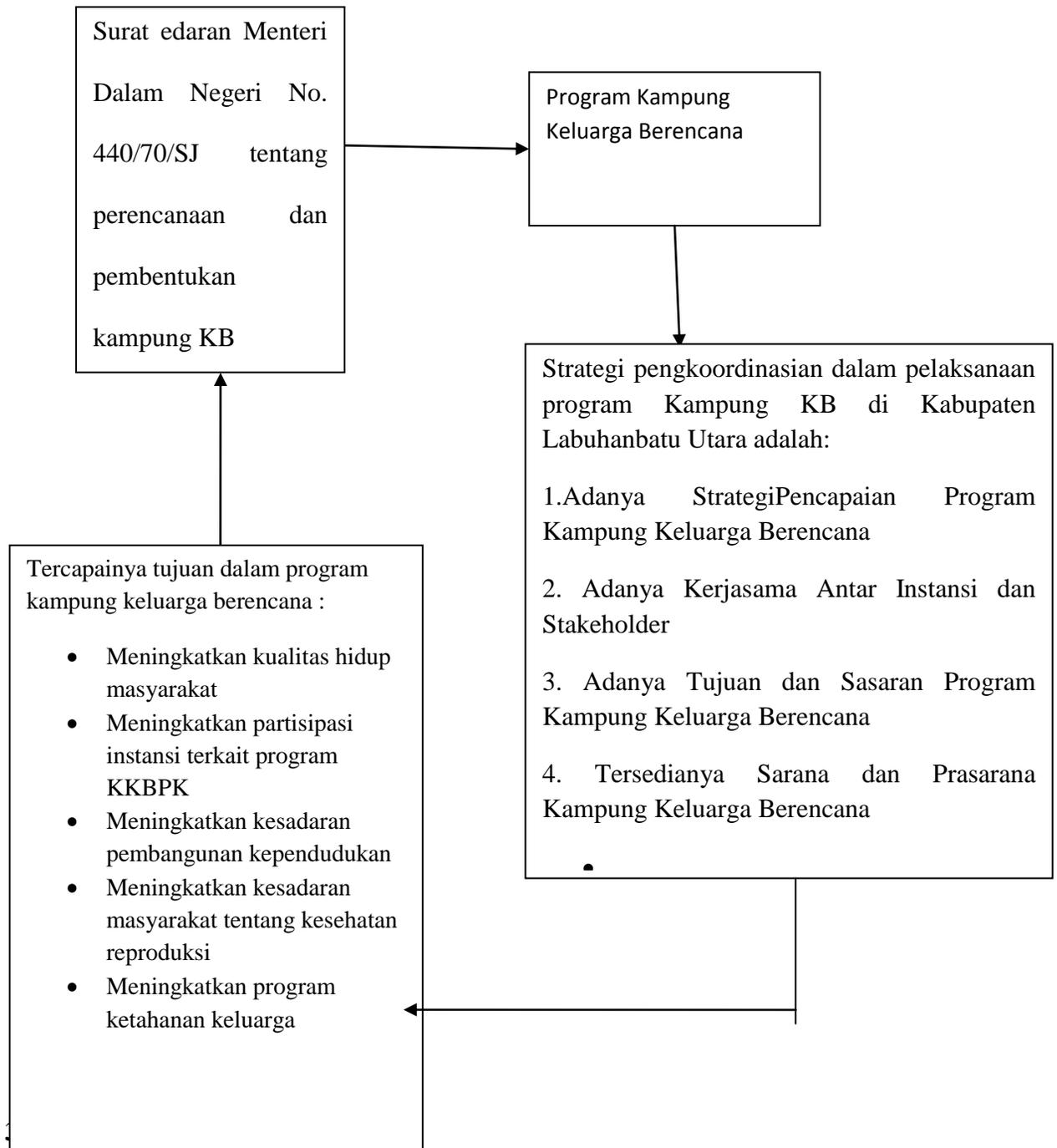
Menentukan metodologi penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah lanjutannya dalam proses analisa data.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena itu, konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruk atau yang lebu dikenal dengan nama variabel. Adapun kerangka konsep dari penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian



C. Defenisi Konsep

Nawawi (1991:43), mengemukakan, konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti:

1. Strategi merupakan sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penetapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, yang memperhatikan keunggulan kompetitif, komprehensif, dan sinergis yang ideal dan berkelanjutan, sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan ideal dari individu atau organisasi.
2. Pengkoordinasian merupakan suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama.
3. Keluarga Berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan sertabantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4. Program Kampung Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kualitas kependudukan di Indonesia, yang basisnya setingkat dusun yang mempunyai latar belakang pesertaan keluarga berencana

yang rendah, daerah pinggiran, daerah miskin dan terpencil serta mengatur sumber daya manusia, menyeimbangkan daya tampung lingkungan dengan sumber daya yang ada serta pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dan variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya Strategi Pencapaian Program Kampung Keluarga Berencana
2. Adanya Kerjasama Antar Instansi dan Stakeholder
3. Adanya Tujuan dan Sasaran Program Kampung Keluarga Berencana
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kampung Keluarga Berencana.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang strategi

pengkoordinasian program kampung keluarga berencana, sumber data dalam penelitian yang menjadi narasumber atau informan adalah sebagai berikut:

1. Jamaluddin, S.Ag.M.AP : sebagai sekretaris dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten labuhanbatu utara
2. Erni malinda napitupulu, SKM : sebagai pelaksana bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Ngadri : sebagai pelaksana bidang keluarga berencana
4. Jonny naibaho : sebagai warga masyarakat/perangkat desa hasang
5. Julianingsih : sebagai warga masyarakat desa hasang

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara :

a) Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari narasumber yang kita jadikan objek penelitian dan bisa juga dari survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu :

Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan/narasumber dan menggunakan guide interview. Wawancara percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan

oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang para subeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara itu.

b) Data sekunder

Penelitian dengan pengumpulan data ini, peneliti mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Sebagaimana yang telah dijelaskan, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan analisis datanya bersifat kualitatif. Penggunaan metode tersebut menggunakan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan strategi pengkoordinasian program kampung keluarga berencana. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah kualittatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Sistem penelitian sudah jelas harus memilih lokasi penelitian yang nyata dan jelas, yang berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan manipulasi suatu data dan jelas, yang berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan manipulasi suatu data penelitian tersebut. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat untuk meneliti dan mencari data yang akan dikumpulkan yang berguna untuk penelitian.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dari bulan Desember 2017 sampai bulan Februari 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) merupakan dinas yang dapat dikatakan dinas termuda di kabupaten Labuhanbatu Utara, berdiri sejak bulan Januari 2017 setelah pecah dari badan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sesuai dengan UU N0 23 Tahun 2014 tentang urusan daerah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur urusan

daerahnya masing-masing (asas desentralisasi) pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mendirikan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada di jalan Koptu Mahmud Lubis kompleks pasar Aek Kanopan Kode pos 21457.

2. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara

Visi dan Misi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara, perumusan visi dan misi jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil analisis sebelumnya.

(a). Visi

Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of diraction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Perntaan visi haruslah realistis, artinya bahwa visi harus didasarkan pada realita dan bukanlah buah pikiran yang berandai-andai agar dapat menjadi suatu komitmen yang bisa diraih. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada masa mendatang diarahkan untuk membangun

peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga Layanan Publik dengan visi sebagai berikut, yaitu:

“ Terwujudnya lembaga yang handal dan dipercayai dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga Berkualitas”.

Penjelasan dari visi diatas adalah:

(1) Penduduk tumbuh seimbang adalah pertumbuhan penduduk yang seimbang dari segi kuantitas maupun kualitas, yang ditandai dengan menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk, menurunnya angka kelahiran total pada wanita usia subur 15-40 tahun, meningkatnya pemakaian kontrasepsi akseptor KB, menurunnya tingkat drop out dalam ber-KB, serta terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

(b). Misi

Visi perlu diwujudkan dengan suatu tindakan nyata yang dinyatakan melalui misi. Misi akan membantu lebih jelas penggambaran visi yang akan dicapai serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Misi sangat penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Rumusan misi dalam dokumen rentra dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi penggunaan bahasa yang sederhana., ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

- (1) Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur
- (2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk
- (3) Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

Penjelasan dari misi diatas adalah

(a) Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(b) Mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran.

(c) Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera adalah upaya menciptakan suatu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hidup spritual dan materil yang layak, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras,

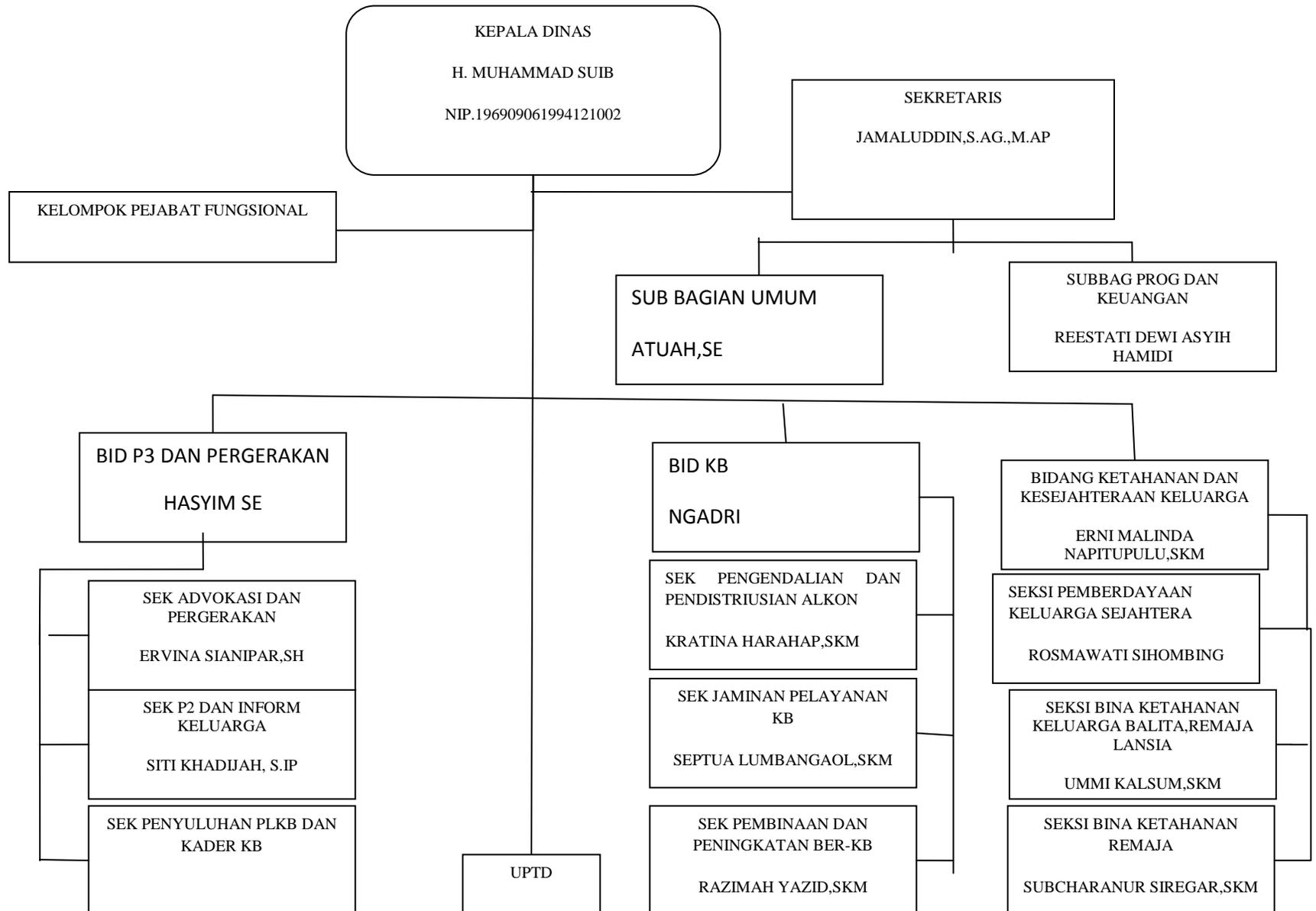
seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat lingkungannya.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat terwujud melalui kerjasama dan koordinasi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan maupun kelompok kerja yang berfungsi melakukan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal. Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Labuhanbatu Utara pada gambar 3.2 sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik berdasarkan umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan strategi pengkoordinasian program kampung keluarga berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Berikut akan disampaikan karakteristik narasumber dan karakteristik jawaban para narasumber digunakan sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan pada ulasan-ulasan berikut ini:

a. Deskripsi narasumber menurut jenis kelamin

Berdasarkan jenis penelitian narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

DESKRIPSI NARASUMBER BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
Jumlah		5 orang	100 %

Sumber : Data Interview Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 yang tercermin di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentase 60 persen, sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan dengan frekuensi 2 orang dengan frekuensi 40 persen.

b. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, Narasumber dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu, tingkat SLTA, S1, dan tingkat S2 pada tabel 4.2 ini berikut disajikan persentasi untuk masing-masing dari kategori tersebut:

Tabel 4.2

DESKRIPSI NARASUMBER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SLTA	2	40%
2	S1	2	40%
3	S2	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Interview 2018

Berdasarkan tabel 4.2 yang tercermin diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berdasarakan tingkat pendidikan yaitu tingkat SLTA dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen, tingkat S1 dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen, sedangkan tingkat S2 dengan frekuensi 1 orang dengan persentasi 20 persen.

c. Deskripsi narasumber berdasarkan jabatan atau pekerjaan

berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil, Honor daerah dan ibu rumah tangga pada Tabel 4.3 yang kita akan lihat persentase kategori menurut pekerjaan dan jabtan yang dimiliki narasumber.

Tabel 4.3

**DESKRIPSI NARASUMBER BERDASARKAN JABATAN ATAU
PEKERJAAN**

No	Pekerjaan/jabatan	Frekuensi	Persentase
1	PNS	3	60%
2	Honorer	1	20%
3	Ibu rumah tangga	1	20%
Jumlah		5 orang	100%

Sumber: Data Interview 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat di lihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai PNS dengan frekuensi 3 orang dengan persentase 60 persen, honorer dengan frekuensi 1 orang dengan frekuensi 20 persen, dan ibu rumah tangga dengan frekuensi 1 orang dan persentase 20 persen.

2. Data Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu: Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2 orang Honorer Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara, 1 orang perangkat desa Hasang dan 1 orang warga masyarakat desa Hasang.

a. Adanya Strategi Pencapaian Program Kampung Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana strategi pencapaian program tentu merupakan suatu hal yang sangat penting karena tanpa strategi pencapaian program akan sulit dilakukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin, S.Ag.M.AP selaku sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018, yang menyatakan bahwa strategi pencapaian program Kampung Keluarga Berencana sudah dilakukan di kampung-kampung yang terpilih menjadi kampung Keluarga Berencana. Strategi pencapaian dimaksud berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat kampung keluarga berencana untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku kearah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat secara wajar sehingga masyarakatmelaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab serta ikut serta dalam program yang dicanangkan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Erni malinda napitupulu, SKM selaku pelaksana bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018, yang menyatakan bahwa startegi pencapaian program kampung

keluarga berencana sangat penting dan sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok yang dibentuk di kampung keluarga berencana untuk kemudian diberikan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi tentang KB seperti adanya Bina Pepaya (Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta Dinas Kesehatan dalam hal ini dilakukan oleh Bidan dari Puskesmas.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Ngadri selaku pelaksana bidang keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018 beliau mengatakan strategi pencapaian program kampung keluarga berencana berupa sosialisasi kepada seluruh masyarakat bukan hanya pada orang tua atau keluarga juga kepada masyarakat usia muda ataupun remaja, hal ini disinergikan agar kalangan remaja mengetahui pentingnya hidup sehat, dampak pernikahan dini dan seks bebas. Dalam hal ini banyak cara yang dilakukan untuk mengajak masyarakat agar turut ikut melaksanakan pembangunan kependudukan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Jonny naibaho sebagai warga masyarakat/ perangkat desa hasang pada tanggal 9 februari 2018,mengatakan bahwa strategi pencapaian program kampung keluarga berencana telah berjalan, hal ini dikarenakan keinginan masyarakat untuk ber-KB serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya ber-KB semakin meningkat.

Begitu juga hasil wawancara dengan ibu Julianingsih selaku warga masyarakat desa Hasang pada tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa saat ini strategi pencapaian program kampung keluarga berencana telah berjalan. Karena masyarakat sudah mendapat pengetahuan tentang kampung keluarga berencana serta mendapat keterampilan hasil dari sosialisasi yang diberikan.

b. Adanya Kerjasama Antar Instansi dan Stakeholder

Kerjasama antara instansi dan stakeholder sudah tentu merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin, S.Ag.M.AP selaku sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018, yang menyatakan bahwa banyak kerjasama yang dibina dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan lembaga dan instansi terkait dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana untuk mengkoordinasikan program kampung keluarga berencana karena pada dasarnya program ini memang program besar yang tidak bisa dilaksanakan hanya oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja.

Lembaga atau instansi yang bekerjasama dalam pelaksanaan program ini seperti Dinas Pencatatan Sipil dalam hal ini menyediakan data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu daerah Kampung Keluarga

Berencana, Dinas Pemberdayaan Desa dalam hal ini bertugas membantu memberdayakan masyarakat di desa yang terpilih menjadi kampung keluarga berencana, Dinas Kesehatan dalam hal ini membantu pelaksanaan penyuluhan tentang pentingnya ber-KB dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Erni malinda napitupulu, SKM selaku pelaksana bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018, yang menyatakan bahwa banyak kerjasama yang dibina antara instansi terkait dengan stakeholder untuk melaksanakan program kampung keluarga berencana diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan yang bertugas untuk melakukan pelayanan khusus anak dan perempuan karena kekerasan pada anak dan perempuan menjadi salah satu perhatian kampung keluarga berencana. Komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung Keluarga Berencana dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas fungsi instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program kampung keluarga berencana bisa berjalan secara efektif.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Ngadri selaku pelaksana bidang keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018 beliau mengatakan bahwa ada kerjasama antara instansi dengan stakeholder dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana seperti dalam penyediaan dan pendistribusian alat kontrasepsi dari Dinas Kesehatan kemudian di distribusikan ke kantor kecamatan untuk kemudian di serahkan kepada Penyuluh Keluarga Berencana dan akhirnya diserahkan kepada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sampai akhirnya sampai kepada masyarakat, namun keterlambatan pendistribusian juga sering terjadi karena terlalu panjangnya alur distribusi mulai dari dinas kesehatan sampai kepada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk kemudian diserahkan ke kantor camat masing-masing kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Jonny naibaho sebagai warga masyarakat/perangkat desa hasang pada tanggal 9 februari 2018, mengatakan bahwa ada kerjasama yang dilakukan instansi dengan stakeholder dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana. Namun dalam hal penyuluhan kepada masyarakat tidak semua instansi langsung turun kelapangan, biasanya yang memberikan penyuluhan hanya dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau dari bidan puskesmas mewakili dinas kesehatan .

Begitu juga hasil wawancara dengan ibu Julianingsih selaku warga masyarakat desa Hasang pada tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa ada kerjasama instansi dengan stakeholder dalam pelaksanaan program kampung

keluarga berencana. Tidak hanya dinas tapi banyak juga bidan-bidan dari puskesmas yang membantu memberikan arahan dalam ber-KB.

c. Adanya Tujuan dan Sasaran Program Kampung Keluarga Berencana

Tujuan dan sasaran Program Kampung Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Selain tujuan umum tersebut ada juga tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan peran pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Selain tujuan ada juga sasaran yang ingin dicapai yakni sasaran yang merupakan objek dan subjek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berencana adalah Keluarga, remaja, penduduk usia lanjut, pasangan usia

subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia serta sasaran sector sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin, S.Ag.M.AP selaku sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018, yang menyatakan bahwa pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Karena kampung yang terpilih menjadi Kampung Keluarga Berencana sudah sesuai dengan persyaratan, sehingga masyarakat yang mengikuti program-program kampung keluarga berencana sudah merasakan pembangunan keluarga untuk hidup lebih sejahtera.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Erni malinda napitupulu, SKM selaku pelaksana bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018, yang menyatakan bahwa pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, sebab banyak masyarakat kampung keluarga berencana yang sudah menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan pedoman dan juga bantuan yang diberikan pemerintah. Selain itu masyarakat yang sebelumnya tidak ber-KB dikarenakan jauhnya puskesmas atau minimnya fasilitas kesehatan sekarang sudah ber-KB karena dengan adanya Kampung Keluarga Berencana masyarakat mendapat pelayanan yang lebih efektif

dan efisien dengan adanya kunjungan-kunjungan dalam hal ini penyuluhan dan pelayanan implan serta alat kontrasepsi lainnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Ngadri selaku pelaksana bidang keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018 beliau mengatakan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana sudah sesuai dengan tujuan dari Kampung Keluarga Berencana dalam hal ini meningkatkan peran pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan lembaga non swasta (stakeholder) untuk menyelenggarakan program kependudukan. Karena pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana tidak akan bisa terlaksana tanpa pesan instansi atau lembaga lainnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Jonny naibaho sebagai perangkat desa hasangpada tanggal 9 februari 2018, mengatakan bahwa pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana sudah sesuai dengan tujuan awal program karena sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program seperti penyuluhan kepada masyarakat desa, sosialisasi tentang kampung keluarga berencana serta penyediaan alkon dan alat kontrasepsi yang cukup.

Begitu juga hasil wawancara dengan ibu Julianingsih selaku warga masyarakat desa Hasang pada tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana sudah sesuai dengan

tujuan awal program karena jika ingin ber-KB sudah mudah karena banyak tersedia program-program untuk ber-KB disediakan oleh pemerintah, selain banyak juga gratis.

d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kampung Keluarga Berencana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu program, karena sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan suatu program.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin, S.Ag,M.AP selaku sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018, yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana sudah memadai seperti ketersediaan ambulance, obat-obatan gratis dan sarana penunjang lainnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Erni malinda napitupulu, SKM selaku pelaksana bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018, yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana sudah baik seperti penerangan jalan menuju kampung keluarga berencana yang sudah diperbaiki, pelayanan yang semakin ditingkatkan serta angkutan aseptor dan obat-obatan gratis yang diberikan kepada masyarakat selain itu juga mobil penerangan pemuratan film

tentang program kampung keluarga berencana yang diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat yang berada di kampung keluarga berencana.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Ngadri selaku pelaksana bidang keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 7 Februari 2018 beliau mengatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor penting terlaksananya program kampung keluarga berencana sehingga sarana dan prasarana merupakan salah satu hal utama yang diperhatikan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Jonny naibaho sebagai perangkat desa hasang pada tanggal 9 februari 2018, mengatakan bahwa ketersediaan program kampung keluarga berencana sudah baik dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan alat kontrasepsi dan pembangua jalan menuju kampung keluarga berencana yang semakin baik.

juga hasil wawancara dengan ibu Julianingsih selaku warga masyarakat desa Hasang pada tanggal 9 Februari 2018, mengatakan ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup dan baik.

B. Pembahasan

Strategi pengkoordinasian dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten

Labuhanbatu Utara sepenuhnya sudah berjalan sesuai dengan harapan pelaksanaan koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana karena sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya kampung keluarga berencana, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu:

a. Adanya Strategi Pencapaian Program Kampung Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara, strategi pencapaian program sudah tepat dan berjalan dengan baik, sebagaimana masyarakat Kampung Keluarga Berencana dapat mengembangkan potensi diri dan pengetahuan tentang kesehatan juga semakin baik. Sehingga dengan adanya kampung keluarga berencana peningkatan kualitas kehidupan masyarakat semakin meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagaimana hasil wawancara narasumber yang mengatakan bahwa strategi pencapaian Program Kampung Keluarga Berencana sudah dilaksanakan berupa kelompok-kelompok yang dibentuk di Kampung Keluarga Berencana untuk kemudian diberikan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang KB yang diikuti oleh pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dan Desa/Lokasi Kampung Keluarga Berencana untuk kemudian ditindak lanjuti dengan lokakarya mini tingkat Desa dan pelatihan kader. Hasil yang di dapat yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesejahteraan Kampung Keluarga Berencana berupa proses perubahan perilaku

kearah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab serta ikut serta dalam program yang dicanangkan hal ini sesuai dengan tujuan awal program kampung keluarga berencana yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya di daerah terpencil.

Adapun strategi pencapaian program menurut Gaffar dalam Syaiful Sagala(2010:136) sebagai rencana yang mengandung cara komprehensif dan integratif yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna mencapai tujuan.

b. Adanya Kerjasama Antara Instansi dan Stakeholder

Pelaksanaan kerjasama antara instansi dan stakeholder dalam program kampung keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum sepenuhnya optimal, seperti pendistribusian alat kontrasepsi dari Dinas Kesehatan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sering kali mengalami keterlambatan. Serta dalam hal penyuluhan yang jarang dilakukan secara bersamaan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang mengatakan bahwa ada kerjasama antara instansi dengan stakeholder dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana seperti dalam penyediaan dan pendistribusian alat kontrasepsi dari Dinas Kesehatan kemudian di distribusikan ke kantor Kecamatan

untuk kemudian di serahkan kepada Penyuluh Keluarga Berencana dan akhirnya diserahkan kepada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sampai akhirnya sampai kepada masyarakat, namun keterlambatan pendistribusian juga sering terjadi karena terlalu panjangnya alur distribusi mulai dari dinas kesehatan sampai kepada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerjasama antara instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Dengan demikian kerjasama dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

c. Adanya Tujuan dan Sasaran Program Kampung Keluarga Berencana

Adanya tujuan dan sasaran program Kampung Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ingin dicapai yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Serta meningkatkan peran pemerintah dan stake holder dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang mengatakan bahwa masyarakat kampung keluarga berencana sudah banyak menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan pedoman dan juga bantuan yang diberikan pemerintah. Selain itu masyarakat yang sebelumnya tidak ber-KB dikarenakan jauhnya puskesmas atau minimnya fasilitas kesehatan sekarang sudah ber-KB karena dengan adanya Kampung Keluarga Berencana masyarakat mendapat pelayanan yang lebih efektif dan efisien dengan adanya kunjungan-kunjungan dalam hal ini penyuluhan dan pelayanan implan serta alat kontrasepsi lainnya. Seperti yang dikemukakan Handoko (2003:195), pengkoordinasian adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (department-departement atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kampung Keluarga Berencana

Pengkoordinasian suatu program juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan pengkoordinasian program Kampung Keluarga Berencana tersebut..

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam pengkoordinasian program Kampung Keluarga Berencana, sarana dan prasarana

sepenuhnya telah terpenuhi, seperti fasilitas penerangan jalan menuju lokasi Kampung Keluarga Berencana, ketersediaan mobil penerangan yakni mobil pemutaran film tentang program kampung keluarga berencana, mobil angkutan saseptor, mobil pelayanan, ketersediaan alat-alat kontrasepsi dan ketersediaan alat-alat kesehatan bahkan fasilitas untuk melahirkan yang disediakan disetiap kampung keluarga berencana, serta obat-obatan yang seluruhnya diberikan gratis pada masyarakat .

Sebagaimana yang dikemukakan Siagian (2001:24) bahwa efektivnya suatu program yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu, secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka kesimpulan dari penelitian Strategi Pengkoordinasian Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1, Strategi pengkoordinasian dalam Pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengembangkan potensi diri dalam dunia kesehatan dan masyarakat semakin memiliki kreativitas dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang artinya para pelaksana Program Kampung Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kampung Keluarga Berencana bekerja dengan baik.

2. Kerjasama atau pengkoordinasian dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya kerjasama dalam penyediaan dan pendistribusian alat kontrasepsi dari Dinas Kesehatan kemudian di distribusikan ke kantor Kecamatan untuk kemudian di serahkan kepada Penyuluh Keluarga Berencana dan akhirnya diserahkan kepada

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sampai akhirnya sampai kepada masyarakat, namun keterlambatan pendistribusian juga sering terjadi karena terlalu panjangnya alur distribusi mulai dari dinas kesehatan sampai kepada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga menghambat dalam pelaksanaan pendistribusian langsung kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat Kampung Keluarga Berencana yang tidak ber-KB.

3. Efektivitas Strategi Pengkoordinasian dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah efektif hal ini karena tujuan dan sasaran Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah tercapai. Sehingga masyarakat sudah dapat meningkatkan kualitas hidupnya kearah yang lebih baik, yang artinya dalam hal ini peran serta seluruh pihak baik pemerintah dan stake holder sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal.

4. Dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana sudah terpenuhi, contohnya seperti lampu penerangan menuju lokasi Kampung Keluarga Berencana serta fasilitas transportasi pendukung lain yang sudah semakin membaik.

Secara umum strategi pengkoordinasian program kampung keluarga berencana sudah baik hanya saja kerjasama pengkoordinasiannya yang masih

mengalami tumpang tindih pekerjaan, dalam hal pencapaian tujuan sudah sesuai dengan tujuan program serta penyediaan sarana dan prasarana yang cukup.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Strategi Pengkoordinasian Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan yang intens terhadap pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana, seperti dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pelaksana yang menerima mandat terhadap instansi lain untuk melihat jalannya program, apakah program sudah dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana, para implementor perlu menjelaskan informasi tentang alur penyelenggaraan kegiatan baik berupa sumber dana kepada masyarakat dan kepada seluruh instansi terkait pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana.
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara terbuka kepada seluruh instansi terkait pengkoordinasian Program Kampung Keluarga Berencana berupa sosialisasi

Alokasi jadwal kegiatan mingguan maupun bulanan, sosialisasi rencana kegiatan program yang telah disusun, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada tumpang tindih pekerjaan antara instansi terkait satu sama lain.

4. Dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana perlu dilaksanakan koordinasi terhadap setiap lini dilapangan untuk memanfaatkan seluruh data yang di peroleh dari Dinas Pencatatan Sipil sebagai sumber untuk memahami potensi dan permasalahan di Desa/Kelurahan yang terpilih sebagai Kampung Keluarga Berencana untuk kemudian di analisis dan di evaluasi kemudian untuk ditindak lanjuti dalam hal ini lakukan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2004: *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta.

David, F.R. 2004. : *Manajemen Strategis: Konsep. Edisi Ketujuh*". PT. Prenhallindo, Jakarta

David, F. R. 2006. " Strategic management". Concepsts and Cases, Ed 10. Francis Marion University Florence, South Carolina.

F. Glueck William dan Lawrence r. jaugh, 1996: *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*, Erlangga, Jakarta.

Handoko,T. Hani, 2007. *Manajemen. Edisi kedua*. Yogyakarta: Erlangga.

Handoko,T. Hani, 2007. *Manajemen. Edisi kedua*. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta: BPFE-Erlangga.

Hasibuan,Melayu S.P.2006. *Manajemen Dasar,Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

Kementrian PMK. 2016. *Revolusi Mental*. Jakarta: Kementrian PMK

Khair Hazmanan, Laila bismala, Net Arianty dan Linzzy Pratama, 2016: *Manajemen Strategi*, Umsu Press, Medan.

Kurniawati, T. 2004. *Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC

Lubis, Rahmadeni. 2010. Tesis :*Pengaruh Kordinasi Terhadap Efektivitas Kerja di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Manullang. 2001. *Dasar Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

P.B. Triton,2007:*Manajemen Strategis Terapan Perusahaan Dan Bisnis*, Tugu Publisher.

Priyono. Teddy Chandra (ed) 2007: *Pengantar manajemen*. Edisi pertamaa, zifatama

Rivai veitzhal, Deddy Mulyadi, 2012: *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakata.

R. Raco. J, 2010: *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo, Jakarta

Syaiful Sagala, *Mananjemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010 hal. 126

Sugiono. 2006. *Metode penelitian administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Sugiono. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , Edisi 1 Cetakan Ketiga, PT Bima Aksara, Jakarta Solihin Ismail, Adi Maulana (ed), 2012 :
Manajemen strategic, Erlangga, Bandung.

Terry,G.R.2000. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Umar, H. 2001. “ *Strategic Management in Action: Konsep, Teori dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis: Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David dan Wheelen-Hunger*”. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Winrdi.2000. *Asas Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Perundang-undangan

Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/70/SJ Tentang Perencanaan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

Buku Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana Tahun 2015

BKKBN. 2005. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Refroduksi*. Jakarta: BKKBN

BKKBN. 2012 *Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: BKKBN

BKKBN. 2015. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: BKKBN

Internet

Anwar Khairul Muhammad,” *Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) dalam Perencanaan Kota Samarinda*”. Ejournal Adimintrasi Negara. Fakultas Ilm Sosial Dan Ilmu Politik. Vol 4 No.1, Hal. 2306-2319. 20 Februari 2018. <<https://www.ejournal.an.fisip-unmul.org>>

<https://nefitriana.blogspot.co.id/2016/07/teori-koordinasi.html?m=1>

<https://mywonderfullmom.wordpress.com/2012/05/29/pwngkoordinasian-manajemen/>

<https://zulfaidah-indriana.blogspot.co.id/2013/05/koordinasi-komunikasi-dan-supervisi.html?m=1>

<http://www.google.co.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : EVA YULIANDA
Tempat/Tanggal Lahir : Sukajadi, 06 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : JL. Bukit Barisan gg Bunga No. 90B
Jurusan : Administrasi Negara
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Anak Ke : 1 dari 6 bersaudara

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Muksin Pasaribu
Ibu : Nuryanti br Sagala
Alamat : Sukajadi Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

3. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 114348 Lubuk Tikko Tahun 2007/2008, berijazah
2. SMP Negeri 2 Kualuh Selatan Tahun 2010/2011, berijazah
3. SMA Negeri 1 Kualuh Hulu Tahun 2013/2014, berijazah
4. Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara konsentrasi Ilmu Administrasi Negara Tahun 2014 sampai sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Penulis

EVAYULIANDA

